

MEWUJUDKAN MASYARAKAT MORAL BERDAYA SAING TINGGI

Sayuti Hasibuan

Program Pascasarjana, Program Magister Manajemen
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRACT

The development experience since Indonesian independence generally shows that welfare is still out of reach. It shows that there is a need to replace the basic ideology of development operational from material to human beings. The operational vision need to be changed from creating a welfare nation to creating a morally nation that has high competency since the latter measurement comprise more, materially or non-materially.

In this writing, writer stated that the absolute requirement for the development success of developing countries, including Indonesia, is strategy orientation changes from outward looking to inward looking; from basic operational ideology of material to human and humanity ideology.

Keywords: development ideology, material orientation, humanity, morally nation

PENDAHULUAN

Tidaklah disangsikan bahwa Sritua Arief sepanjang hayatnya menempatkan secara sentral kepentingan dan kehormatan bangsa dalam pola pikirnya. Kehormatan dan kepentingan rakyat Indonesia tercermin oleh keprihatinannya akan bahaya ketergantungan kepada asing dan intervensi asing dalam kebijakan perekonomian Indonesia. Intervensi asing ini menjelma antara lain dalam masalah hutang luar negeri yang menyengsarakan rakyat; dan semakin sulitnya posisi ekonomi kerakyatan dengan ditempuhnya berbagai kebijakan yang justru menambah kemiskinan rakyat. (Arief, 2001)

Bilamana diperhatikan dan dibaca suasana batin Sritua Arief dalam tulisan-

tulisannya, dapatlah disampaikan adanya bukan saja keprihatinan dan empati yang mendalam terhadap rakyat miskin, tetapi juga ada kemarahan dan tidak sabar terhadap segala sesuatu yang sedang menimpa bangsa ini. Perbaikan fundamental dalam ekonomi rakyat akan berhasil bilamana dapat diwujudkan negara pengemban amanat rakyat yang efektif.

Secara lebih konkrit di Indonesia perlu diciptakan apa yang disebut sebagai "*an effective development state*" yaitu suatu pemerintahan negara dengan elit kekuasaan berperilaku sebagai berikut:

1. Bebas dari kepentingan pihak manapun kecuali kepentingan rakyat banyak
2. Bebas dari godaan untuk memperkaya diri

- sendiri dan keluarga dengan kekuasaan yang dipegangnya
3. Menganut ideologi politik yang memihak rakyat banyak, pro kepada keadilan, anti penindasan, anti feodalisme dan nepotisme, menjunjung tinggi integritas, menghargai kerja nyata dan *committed* terhadap emansipasi kemanusiaan untuk semua orang
 4. Tidak melaksanakan pemerintahan negara sebagai suatu "*soft state*", yaitu suatu pemerintahan yang lemah dan tidak berani melaksanakan tindakan hukum terhadap segala bentuk penyimpangan yang menghambat transformasi sosial yang hakiki. (Sritua Arief, 2000:50),

Penulis sepakat secara prinsip dengan apa yang dikemukakan Sritua Arief. Persoalan sekarang adalah bagaimana merealisasikan ide-ide ini? Itulah yang akan dikemukakan dalam tulisan ini.

KEPENTINGAN RAKYAT BANYAK: APA MAKSUDNYA?

Yang ditanyakan di sini adalah makna operasional dari perkataan kepentingan rakyat banyak dari persyaratan nomor (1) di atas. Secara umum dan historis kepentingan rakyat banyak diartikan sebagai terwujudnya negara adil dan makmur. Semua tindakan dan kebijakan yang mengarah kepada terwujudnya negara adil makmur dianggap benar. Dalam rangka perwujudan ini, ideologi operasional yang digunakan adalah ideologi operasional berbasis materi dalam bentuk peningkatan pendapatan per kapita. Semakin merata peningkatan pendapatan per kapita di kalangan rakyat maka semakin adil pembangunan; semakin tidak merata semakin tidak adil. Dalam rangka keadilan dan

kemakmuran, dalam orde baru, ditempuh kebijakan trilogi pembangunan. Walaupun pelaksanaan trilogi pembangunan tidaklah sekonsisten seperti yang diharapkan, tetapi maksud dasar dari kebijakan ini adalah peningkatan pendapatan per kapita yang merata dalam upaya mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan.

Pengalaman pembangunan sejak Indonesia merdeka secara umum menunjuk kepada keadaan bahwa keadilan makmur itu jauh dari terlaksana. Pengangguran secara fundamental belum terselesaikan. Kesenjangan berbagai ragam masih menandai masyarakat Indonesia. Pelaksanaan tanggung jawab utama sebagai manusia, yaitu tanggung jawab moral dalam kehidupan publik masih jauh dari prinsip luhur Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Segala sesuatu ini menunjuk pada perlunya digantikan basis ideologi operasional pembangunan dari materi kepada manusia. Visi operasional perlu diubah dari terciptanya negara adil makmur menjadi terciptanya negara moral berdaya saing tinggi oleh karena ukuran terakhir ini lebih mencakup, baik materi maupun non-materi. Ukuran keberhasilan operasional perlu diubah dari maksimisasi pendapatan per kapita menjadi maksimisasi produktivitas masyarakat. Produktivitas masyarakat yang meningkat akan memberi kemungkinan bagi peningkatan kemakmuran yang berkelanjutan dan berdaya saing. Produktivitas yang meningkat berarti tersedianya surplus yang dapat digunakan untuk tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat maupun untuk pemupukan modal. Kebijakan operasional yang bermoral akan menciptakan keadilan baik dalam proses penciptaan surplus maupun dalam peman-

faatan surplus selanjutnya.

Manusia sekarang ditempatkan sebagai panglima dalam keseluruhan upaya mensejahterakan bangsa dan materi sebagai alat. Ini adalah kebalikan dari apa yang dilaksanakan selama ini. Adanya perubahan posisi manusia secara operasional akan memberikan arti tertentu kepada persyaratan nomor (2) dan seterusnya dalam rangka menciptakan lembaga negara yang efektif bagi pembangunan bangsa.

Sudah barang tentu manusia yang memegang kekuasaan perlu bertindak bebas dari pengaruh lain kecuali dari pertimbangan peningkatan daya saing, produktivitas, dan moralitas bangsa. Dalam kaitan ini perlu dibangun infrastruktur moral yang kuat dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai landasan bagi pelaksanaan hukum yang konsisten. Syarat nomor (2) di atas akan lebih mudah terpenuhi.

Pengutamaan kemanusiaan merupakan persyaratan yang dituntut agar produktivitas masyarakat, daya saing, dan pelaksanaan moralitas dapat meningkat. Kebijakan-kebijakan operasional yang diusung perlu mencerminkan upaya mengangkat harkat kemanusiaan serta mengembangkan potensi kemampuan manusia dengan sepenuhnya. KKN, feodalisme dan penindasan dalam berbagai bentuknya tidak sejalan dengan sikap pengutamaan kemanusiaan. Dasar penghargaan kepada seseorang adalah amat nyatanya, bukan titel-titel yang disandang. Memang di sini perlu ada perubahan budaya politik dari tujuan maksimisasi kekuatan politik dalam berpolitik menjadi maksimisasi daya saing dan kesejahteraan rakyat. Adanya perubahan budaya politik ini merupakan sebagian dari perubahan untuk memenuhi persyaratan nomor (3).

Hal-hal di atas kesemuanya berarti bahwa yang ingin ditegakkan adalah masyarakat yang bukan saja demokratis tetapi juga yang memiliki integritas tinggi. Tidak boleh ada “*soft state*”, “negara dan masyarakat lembek”, “republik pisang”; pejabatnya mudah “dibeli”, baik dengan uang maupun dengan pujian dan hadiah dari orang-orang asing, sebagaimana adanya sebagian sultan-sultan zaman dahulu di nusantara dan sebagian pejabat masa kini; suatu masyarakat yang serba kompromisitas secara moral dan hukum dan amat konservatif menghadapi perubahan. Kalau negara dan masyarakatnya bersifat lembek, maka masyarakat dan negara demikian akan kalah bersaing melawan hawa nafsunya sendiri yang negatif dan dalam persaingan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dengan demikian diharapkan persyaratan nomor (4) dapat terpenuhi.

Bilamana ciri-ciri masyarakat lembek dapat dihindarkan, maka suatu negara yang efektif bagi pembangunan bangsa, “*an effective developmental state*”, dapatlah diwujudkan.

Tetapi apakah adanya perubahan ideologi operasional dari materi kepada manusia dan terbentuknya pemerintahan negara yang efektif dapat menjawab keprihatinan-keprihatinan yang dikemukakan Sritua Arief? Dalam tulisan ini ditinjau keprihatinan-keprihatinan ini sebagaimana yang diungkapkan dalam dua buku beliau yang dikemukakan di atas. Keprihatinan-keprihatinan ini dibahas dalam dua kelompok permasalahan: ekonomi kerakyatan dan ketergantungan kepada asing.

EKONOMI KERAKYATAN

Bagaimana membangun ekonomi rakyat

Indonesia? Sritua Arief seperti juga banyak ekonomi lainnya berpendirian bahwa pendekatan yang cocok untuk membangun ekonomi rakyat dalam negara-negara berkembang seperti Indonesia adalah pendekatan strukturalis. Dalam pendekatan strukturalis, pembangunan ekonomi rakyat hanyalah bisa berhasil dilakukan "bilamana prakondisi sosial yang kondusif untuk tujuan ini dihadirkan terlebih dahulu serta dijadikan sebagai landasan perubahan sosial. Upaya untuk menghadirkan prakondisi sosial ini menyangkut perombakan kelembagaan masyarakat yang ada, struktur sosial yang ada, dan permintaan efektif yang ada. Ini dikemukakan sebagai sesuatu yang mutlak perlu dilakukan terlebih dahulu" (Arief, 1995:100). Dengan adanya perombakan sosial ini dan dengan diutamakannya pembangunan ekonomi yang berorientasi kebutuhan rakyat banyak (mengutamakan produksi "wage-goods") dan dengan melibatkan rakyat banyak dalam proses produksi, maka ekonomi rakyat akan dapat terbangun. Maka akan terlaksana proses pemerataan yang sejalan dengan proses pertumbuhan atau *redistribution with growth*. Alat bagi pelibatan rakyat banyak dalam ekonomi yang sejalan dengan pola pikir strukturalis ini adalah pembangunan koperasi sebagaimana yang dianjurkan oleh Bung Hatta.

Apa yang dapat dikemukakan mengenai pendekatan strukturalis ini? Ada empat hal yang dapat disampaikan.

Pertama, pendekatan strukturalis ini sebagaimana sudah disampaikan, amat berbeda dengan pendekatan neo-klasik. Dengan pendekatan neo-klasik atau pendekatan dualistis, pertumbuhan ekonomi tinggi diutamakan; pembangunan industri di

perkotaan dengan dukungan pengusaha-pengusaha besar dijadikan tumpuan. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi tinggi maka akan tersedia dana, utamanya dikumpulkan melalui pajak, yang akan dapat dimanfaatkan bagi pembangunan ekonomi rakyat. Indonesia selama orde baru utamanya menggunakan pendekatan ini. Ditinjau dari segi pembangunan ekonomi rakyat, pendekatan demikian itu ternyata tidak berhasil secara prinsip dan kenyataan. Kebijakan "*redistribution from growth*" melalui "*trickle-down effect*" ternyata tidak berhasil menciptakan pembangunan ekonomi rakyat banyak secara berkelanjutan. Ternyata yang lebih berjaya adalah berlakunya hukum akumulasi kekayaan dikalangan segelintir orang, yaitu kaum yang memiliki moral besar dan posisi politik kuat dalam masyarakat.

Kedua, kegagalan pendekatan neo-klasik ini memperkokoh pendekatan strukturalis sebagai pendekatan alternatif dalam membangun ekonomi rakyat. Pendekatan strukturalis mengedepankan pembangunan berbasis rakyat banyak khususnya petani dan para pengusaha kecil-menengah. Ini memang tepat. Masalah pokok di sini adalah bagaimana mengadakan perubahan sosial yang menyangkut "perombakan kelembagaan masyarakat yang ada, struktur sosial yang ada, dan permintaan efektif yang ada", sebagai prasyarat sebelum dilaksanakan pembangunan ekonomi rakyat. Apakah terdapat dapat diterima oleh masyarakat, dalam sistem demokrasi atau semi-demokrasi, perombakan besar-besaran dahulu sebelum langkah sesungguhnya membangun ekonomi rakyat dilaksanakan? Singkatnya, walaupun kita sepakat dengan pendekatan struktural ini, ada masalah mendasar bagaimana melaksanakan dan

apakah diterima oleh rakyat perubahan cepat dan mendasar yang dibutuhkan; jadi ada masalah “*feasibility*” dan “*acceptability*”. Memang para ekonomi tidak memiliki “bagaimana” perubahan harus diusung. Metoda analisa dalam ilmu ekonomi yang dikenal dengan perbandingan keadaan statis atau “*comparative statics*” yang membandingkan keadaan berbeda yang serba berkeselimbangan tidak menjelaskan bagaimana keseimbangan baru dibentuk. Itu berada di luar jangkauan metoda “*comparative statics*”. Para ekonomi berbicara selalu mengenai keseimbangan. Padahal dunia nyata ditandai oleh keadaan yang serba tidak seimbang.

Ketiga, terlepas dari masalah “bagaimana” dan masalah penerimaan masyarakat, wacana pendekatan strukturalis ini masih berada dalam orbit paradigma materialistik. Memang pendekatan strukturalis mengutamakan pendekatan masyarakat sebagai sumber pertumbuhan. Itulah makna dari “*redistribution with growth*” yang membedakannya dari “*redistribution from growth*”; itulah barangkali sumbangan besar pendekatan ini bagi pemikiran pembangunan. Masyarakat atau rakyat banyak diutamakan. Tetapi idiologi operasional yang digunakan masih tetap berbasis materi. Ukuran kemajuan yang digunakan masih tetap produk domestik bruto atau versi lain dari konsep ini. (Arief, 2001: 55-61). Pengalaman pembangunan di banyak negara dengan dosis struktural yang besar, khususnya di Amerika Latin, menunjukkan kurangberhasilan yang besar walaupun negara-negara ini telah merdeka secara politis lebih dari sepuluh dekade.

Apakah penggunaan idiologi operasional materi itu salah? Jawabnya memang

demikian sebab penggunaan ukuran materi tidak sesuai dengan pengutamaan manusia dalam pendekatan strukturalis. Pengutamaan manusia seyogyanya menggunakan idiologi operasional berbasis manusia sehingga persyaratan konsistensi dari kebenaran empiris dapat terpenuhi. Kalau idiologi operasional materi masih tetap digunakan, maka pelaksanaan pembangunan akan terus terjerat oleh norma-norma moral dan etika berbasis materi seperti maksimisasi keuntungan finansial, apa saja boleh asal untuk kemajuan materi, penyisihan nilai-nilai moral non material dalam kehidupan sehari-hari, hedonisme, dan lain-lain, yang kesemuanya berujung kepada tidak tercapainya tujuan-tujuan kemanusiaan yang berkaitan dengan pendekatan strukturalis ini. Di bidang ekonomi hukum konsentrasi kekayaan dan akumulasi modal oleh para pemiliki modal tetap berlaku. Prinsip moral yang digunakan adalah prinsip nilai moral relatif yang pengejawantahannya dalam praktek adalah pragmatisme. Pada tingkat nasional ini berarti kesenjangan dan penyakit-penyakit sosial cenderung dilanggengkan. Pada tingkat internasional hukum rimba, siapa yang kuat dia menang; bukan hukum kemanusiaan berdasar atas keadilan. Sebagai contoh adalah perundingan-perundingan di WTO. Negara-negara maju minta supaya negara-negara berkembang membebaskan pasar pertanian mereka. Sementara negara maju terus memberi subsidi kepada petani-petani mereka. Uni Eropa memberikan subsidi pertanian sejumlah US\$121 milyar dan Amerika Serikat US\$39 pada tahun 2003 yang lalu (The Economist, 2004:92). Pasar bebas berlaku untuk yang relatif lemah secara ekonomi. Untuk yang kuat tidak perlu

berlaku. Demikian anggapan yang terkandung dalam posisi ini. Bahkan lebih jauh lagi, di bidang politik faham materialisme ini merupakan basis ideologi dari negara-negara kuat memaksakan kehendak mereka di dunia. Lebih lanjut mengenai jeratan faham materialisme dalam pembangunan Indonesia, mohon dilihat karya penulis berjudul "*Meraih Keunggulan Indonesia – Strategi Alternatif Pembangunan Bangsa-*", Fakultas Ekonomi, Universitas Al-Alzhar Indonesia, Jakarta 2004, bab 2.

Keempat, dalam konteks pembangunan Indonesia, dimana tempat Tuhan Yang Maha Esa dalam pola pikir ini? Ini amat penting sebab Indonesia menganut faham atau ideologi Pancasila; sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa memerlukan operasionalisasi secara tali temali dengan prinsip-prinsip lain dari Pancasila. Ukuran berbasis materi, seperti produk domestik bruto atau variannya, tidak mungkin menangkap tali temali keseluruhan ini. Bagaimanapun dalam konteks pembangunan Indonesia yang berpancasila, pendekatan struktural ini terasa parsial, non-holistik. Contoh kelembagaan dari pendekatan non-holistik ini adalah koperasi. Koperasi mengutamakan kepentingan rakyat banyak melalui demokrasi tetapi tetap dalam orbit paradigma materi.

Kesimpulannya, ditinjau dari segi pembangunan ekonomi rakyat, pendekatan strukturalis sudah tepat memberi tekanan kepada rakyat banyak sebagai sasaran pembangunan; juga sudah tepat menggaris bawahi perlunya perubahan struktural dalam hubungan berbagai variabel kemasyarakatan dalam upaya meningkatkan ekonomi rakyat. Tetapi ada masalah bagaimana melaksanakan

dan juga masalah penerimaan masyarakat mengenai perubahan-perubahan yang dibutuhkan yang mendahului program pembangunan ekonomi rakyat. Kalau perubahan itu dipaksakan, maka itu jelas tidak akan berhasil. Tetapi yang amat penting ialah bahwa pendekatan struktural ini masih berada dalam orbit faham materialistik dengan ukuran operasional utama pertumbuhan ekonomi dan segala jeratan moralnya yang pada akhirnya meniadakan atau menafikan sasaran-sasaran kemanusiaan yang mau dicapai. Juga secara normatif, ada masalah dasar yaitu belum tercapunya prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pola pikir strukturalis ini.

NEGARA DAN MASYARAKAT MORAL BERDAYA SAING TINGGI

Apakah ada pendekatan pembangunan masyarakat untuk mengupayakan hal-hal yang baik dan sekaligus mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada dalam pendekatan struktural?

Jawabnya ialah ada dan pendekatan demikian itu adalah pendekatan holistik atau pendekatan menyeluruh. Dalam pendekatan ini yang dituju adalah maksimisasi produktivitas masyarakat secara keseluruhan. Untuk meningkatkan produktivitas ini maka kemampuan memproduksi khususnya dan berkinerja umumnya dari masyarakat perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Ini juga berarti perlunya perubahan struktural nyata di masyarakat, utamanya perubahan dalam arah dan untuk siapa alokasi sumber masyarakat dilakukan. Namun perubahan struktural ini terkait langsung dengan kepentingan berbagai kelompok masyarakat utamanya rakyat banyak. Juga perubahan struktural itu dilaksanakan bersamaan dengan

peningkatan produktivitas dan tidak mendahuluinya. Di bidang ekonomi peningkatan kemampuan ini antara lain adalah kemampuan daya belinya. Karena sebagian besar masyarakat adalah petani, maka otomatis pengembangan kemampuan petani merupakan prioritas. Pengembangan kemampuan usaha perdagangan dan industri dilaksanakan sejalan dengan pengembangan pertanian. Di sini tidak berlaku prinsip upah rendah. Yang berlaku adalah prinsip keadilan sesuai kinerja perorangan maupun kelompok. Dengan meningkatnya daya beli petani dan kebanyakan rakyat lainnya, maka akan berlangsung industrialisasi alami. Produksi nasional akan semakin mengarah kepada pola produksi berisikan unsur teknologi dan aplikasi ilmu yang mengarah kepada pola produksi berisikan unsur teknologi dan aplikasi mutu yang lebih besar. Transformasi sosial akan berlangsung secara demokratis kearah masyarakat yang lebih cerdas dari sebelumnya.

Dimana peran prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam transformasi sosial ini? Nilai-nilai moral obyektif dari agama-agama merupakan bagian tidak terpisahkan dari transformasi sosial ini. Dengan membangun infrastruktur moral yang kokoh, maka nilai-nilai agama akan mendorong unsur-unsur positif dalam transformasi sosial seperti pelaksanaan disiplin, penghormatan terhadap kebhinekaan termasuk kebhinekaan beragama, pengembangan sifat-sifat kasih dan sayang, rasa tanggung jawab, mengembalikan rasa malu di kalangan anggota masyarakat, percaya diri, cinta lingkungan, tidak takut kepada apa dan siapapun kecuali kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengembangan kompetensi dan transformasi setiap lembaga menjadi lembaga belajar, dan lain-

lain. Infrastruktur moral merupakan alat untuk mengasah nurani dan meningkatkan kecerdasan rohani. Di lain pihak nilai agama akan berperan untuk mencegah hal-hal negatif seperti praktek hedonisme, korupsi dan kejahatan-kejahatan lainnya, keserakahan, menuhankan benda dan kekuasaan, hilangnya empati, dan lain-lain. Dengan demikian dapat dikemukakan transformasi sosial yang diupayakan bertujuan bukan saja peningkatan produktivitas masyarakat atau daya saing masyarakat, tetapi juga moralitas masyarakat. Yang dituju adalah masyarakat moral yang berdaya saing tinggi yang segala sesuatunya diupayakan melalui proses demokrasi.

Di mana peran koperasi dalam transformasi sosial ini? Koperasi sebagaimana yang diartikan selama ini, setelah dimasukkan secara kelembagaan unsur Ketuhanan Yang Maha Esa, tentu dapat berperan kearah penciptaan struktur masyarakat yang lebih adil dan produktif. Namun dapat disampaikan bahwa lembaga koperasi bukanlah satu-satunya lembaga ekonomi yang dapat mengupayakan produktivitas masyarakat tinggi sekaligus bermoral. Secara prinsip bentuk-bentuk usaha lain juga mampu semua lembaga dalam konsepsi ini menjadikan peningkatan kemampuan manusia termasuk kemampuan moralitasnya, sebagai tumpuan menciptakan surplus. Agar itu bisa berhasil secara berkelanjutan dibutuhkan keadilan dan pelaksanaan etika dalam memproduksi apapun bentuk hukum lembaganya.

Dapatlah diperhatikan bahwa pendekatan menyeluruh yang disampaikan di sini mencakup hal-hal yang selama ini belum diperhatikan dalam perbendaharaan pemikiran pembangunan yaitu memasukkan unsur

moralitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam model pembangunan. Adanya sasaran umum operasional berupa masyarakat dan negara moral berdaya saing tinggi menuntutnya terciptanya kelembagaan pelaksanaan yang sesuai yang perlu dibentuk.

KETERGANTUNGAN KEPADA ASING

Apakah pendekatan menyeluruh sebagaimana dikemukakan di atas dapat memberi petunjuk mengenai kebijakan-kebijakan yang selayaknya ditempuh dalam kaitan dengan hubungan dengan negara-negara yang sudah maju? Jawabnya adalah dapat. Setidaknya-tidaknya ada tiga dimensi yang perlu perhatian sungguh-sungguh dalam rangka hubungan dengan asing. Pertama, secara umum, memperkokoh kelembagaan pembangunan dalam negeri; kedua melaksanakan penarikan diri terbatas dalam kaitan dengan luar negeri atau melaksanakan autarki terbatas; dan sekaligus memaksimalkan manfaat dari hubungan yang ada.

1. Memperkuat kelembagaan pembangunan dalam negeri

Perlu ditekankan bahwa strategi secara dasar idiologi operasional yang dianut yang menimbulkan ketergantungan bukan saja bersifat materialistis tetapi juga eksogen. Pendekatan eksogen atau pendekatan luar berkaitan dengan masalah bagaimana sektor industri yang menjadi tumpuan bisa berkembang. Ia bisa berkembang kalau ia mendapat input teknologi dan modal. Kedua hal ini, teknologi dan modal, dianggap langka di dalam negeri. Oleh karena itu satu-satunya jalan bagi pembangunan sektor modern ini khususnya dan pembangunan umumnya adalah dengan memasukkan modal dan teknologi dari luar. Hubungan dengan

luar negeri mesti dijalin dengan sebaik-baiknya, lebih baik dari hubungan biasa yang ada di antara bangsa-bangsa beradab. Unsur "angkat telor" atau "mengambil muka" terhadap orang asing haruslah besar.

Kalau sekarang kita menggunakan produktivitas masyarakat dan daya saing masyarakat di dalam negara dan masyarakat yang bermoral, maka syarat untuk itu adalah penguatan dan peningkatan kemampuan kelembagaan pembangunan didalam negeri. Dengan kelembagaan pembangunan yang lebih berkemampuan dan kokoh, maka aspek-aspek yang merugikan dalam hubungan dengan asing akan dapat dihindarkan; sebaliknya kemungkinan berhasil untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada akan lebih besar.

2. Aturki terbatas

Satu anggapan yang salah yang dianut selama ini yaitu bahwa hubungan ekonomi khususnya yang menyangkut soal pinjam meminjam dan investasi asing akan selalu baik dan menguntungkan Indonesia. Jelas ini anggapan yang keliru. Ternyata strategi dualistis atau neo-klasik yang berorientasi keluar menyebabkan banyak kerugian termasuk semakin tergantungnya negara-negara berkembang kepada negara maju. Hubungan yang merugikan dan ketergantungan yang semakin besar dengan pihak luar negeri menyangkut hutang, investasi, perdagangan, intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi nasional dan ketergantungan kepada lembaga keuangan internasional (Arief, 2001).

Ada satu skema yang menarik berbentuk diagram yang disampaikan Sritua Arief pada halaman 29 dari buku di atas. Diagram memperlihatkan bagaimana hutang luar

negeri menekan pemerintah dan masyarakat Indonesia dari sisi atas, dengan kerugian ditimpakan utamanya kepada buruh, pengusaha kecil dan sektor informal serta rakyat kecil pada umumnya; dari sisi bawah modal asing menekan sektor produksi barang dan jasa yang pada gilirannya juga menekan masyarakat kecil.

Dari segi hutang luar negeri, apa yang terjadi adalah adanya pengalihan neto (*net transfer*) dana dari Indonesia keluar negeri baik yang menyangkut pemerintah maupun swasta. Pengalihan ini berarti yang masuk kedalam negeri dalam bentuk hutang lebih kecil dari yang keluar dalam bentuk pembayaran hutang. Mengutip data-data dari Bank Dunia, nilai net transfer ini di sektor pemerintah adalah US \$5,3 miliar dalam periode 1985-1991 dan US\$18,7 miliar dalam periode 1992-1996. Jadi dalam periode 1985-1996, terjadi pengalihan dana neto keluar negeri dalam hubungan hutang. Sementara itu hutang terus bertambah sampai sekarang. Umpamanya, utang luar negeri pemerintah pada semester II 2001 berjumlah US\$133,1 milyar dan meningkat menjadi US\$134,9 milyar pada semester II 2003 (Bank Indonesia, 2004:40). Jadi selama dua tahun hutang luar negeri pemerintah dan swasta meningkat dengan US\$1,8 milyar. Selama dua tahun, pembayaran hutang luar negeri pemerintah dan swasta tidak kurang dari US\$8 milyar. Sungguh suatu pendarahan terhadap perekonomian Indonesia. Peningkatan *net transfer* ini sejalan dengan kecenderungan yang dikemukakan Sritua Arief. Mengutip data-data dari Bank Dunia, disampaikan bahwa untuk hutang swasta *net transfer* diperkirakan meningkat dari US\$2,6 miliar pada tahun fiskal 1994 menjadi US\$3 miliar pada tahun 1996, US\$3,4 miliar pada

tahun fiskal 1997, dan sebesar US\$3,7 miliar pada tahun 1998 (Arief, 2001:28). Kesimpulannya; Indonesia terkena perangkap apa yang disebut *paradoks Fisher*, yaitu semakin besar cicilan hutang semakin besar pula hutang baru yang dibutuhkan untuk bayar hutang selanjutnya.

Di bidang investasi, Indonesia juga lahan empuk terjadinya penghisapan surplus ekonomi oleh pihak asing. Sebagai contoh disajikan angka-angka "bahwa misalnya selama periode 1973-1990 nilai kumulatif arus masuk investasi asing sebesar US \$ 5.775 juta telah diiringi dengan nilai kumulatif keuntungan investasi asing yang direpatriasi ke luar negeri sebesar US\$ 58.859 juta (IMF, *Balance of Payments Yearbook*, berbagai tahun). ini berarti setiap US\$1 investasi asing yang masuk telah diikuti dengan US\$10,9 *financial resources* yang keluar. Mengalirnya sumber-sumber keuangan keluar negeri antara lain disebabkan besarnya isi impor dari ekspor Indonesia. Dalam konteks ini, "*Indonesia yang merdeka sekarang ini dapat dikatakan merupakan replika dari Indonesia yang terjajah pada zaman kolonial Belanda. Indonesia terus merupakan pemasok surplus ekonomi yang setia kepada pihak asing*" (Arief, 2001:27)

Kesimpulan yang dapat dikemukakan pada saat ini ialah bahwa dalam hal dana pinjaman maka sesungguhnya ini merugikan Indonesia karena terus terjerat dengan hutang luar negeri yang bertambah besar. Dalam hal investasi asing maka ini terbukti bahwa secara keseluruhan dana yang keluar Indonesia jauh lebih besar dari yang masuk. Dalam dua hal ini terjadi penghisapan surplus ekonomi oleh asing atas kerugian rakyat Indonesia. Lebih lanjut Sritua Arief

mengemukakan adanya kemerosotan nilai tukar ekspor Indonesia bilamana dikaitkan dengan impor. Mengutip studi Bank Dunia, dengan basis indeks 1983-1984, "maka nilai tukar selama tahun 1983-1987 telah merosot dengan 6%. Pada periode 1991-1998 diperkirakan akan terus merosot di bawah 5%,...." (Arief, 2001:258).

Studi-studi mengenai nilai tukar ekspor negara berkembang ke negara-negara maju dalam kaitan dengan impor mereka dari negara maju memperlihatkan kecenderungan meruginya negara-negara sedang berkembang, membenarkan apa yang dikemukakan Sritua Arief. Dalam satu tulisan oleh Alfred Maizels berjudul "New Evidence on the North-South Terms of Trade" (website), dikemukakan bahwa antara tahun 1979-1994, nilai tukar ekspor hasil industri pengolahan negara berkembang secara relatif terus mengalami penurunan. Apa yang disebut sebagai "net barter terms of trade" menurun per tahun sebesar 2.2% untuk semua negara berkembang, 5.7% untuk negara berkembang yang paling terkebelakang 3.6% untuk Amerika Latin, 2.3% untuk negara-negara Mediterranean Basin, dan -1.2% untuk negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Ini tidaklah berarti tidak ada artinya mengekspor sebab nilai ekspor keseluruhan dibandingkan dengan nilai impor ("*income terms of trade*" = *ITT*) ternyata meningkat dengan 5.5% per tahun untuk semua negara berkembang. Untuk negara Asia Timur dan Asia Tenggara, nilai *ITT* adalah 6.8% per tahun selama tahun 1979-1994.

Namun perlu disampaikan semakin besar pendapatan ini setiap tahun yang direpatriasi keluar negeri dalam bentuk keuntungan ekportir negara maju. Itulah artinya "*barter terms of trade yang negatif*". Bilamana

ditambah dengan beban pembayaran hutang yang menghimpit, yang amat mengurangi kemampuan pemerintah memberi jasa-jasa sosial kepada rakyatnya, berlangsungnya "net transfer" baik sektor pemerintah maupun swasta, maka tidaklah mengherankan kehidupan rakyat semakin tertekan.

Apa yang harus dilakukan dalam kaitan dengan hubungan dengan pasar luar negeri?

Perlu ada kebijakan "*delinking*" dengan pasar internasional khususnya yang menyangkut hutang. Hutang yang ada dihapus. Hal ini perlu diperjuangkan terhadap negara-negara maju, khususnya negara-negara eks-penjahat. Hutang baru jangan dibuat. Lebih lanjut diperlukan penilaian kritis terhadap hubungan-hubungan dengan pasar luar negeri. Hubungan investasi, perdagangan, dan keuangan perlu dinilai dengan pasar luar negeri. Hubungan investasi, perdagangan, dan keuangan perlu dinilai dengan kritis bahwa hubungan-hubungan ini menguntungkan Indonesia secara neto dalam jangka panjang. Tidak setiap investasi harus diterima. Investasi di dalam hutan lindung, umpamanya, perlu ditolak walaupun dalam jangka pendek ada pemasukan keuangan. Investasi demikian adalah investasi merusak rumah sendiri. Unsur-unsur hubungan yang kurang menguntungkan bagi penciptaan produktivitas dan moralitas masyarakat dalam negeri, termasuk moralitas kebangsaan, perlu dipotong. Sebaliknya unsur-unsur yang menguntungkan perlu ditingkatkan. Dengan lain perkataan perlu ditempuh kebijakan yang bersifat autarki selektif dalam hubungan dengan luar negeri. autarki selektif inilah arah hubungan dengan pasar luar negeri yang perlu ditempuh untuk menunjang peningkatan daya saing dan moralitas di

dalam negeri dan untuk meminimumkan aspek asimetri dalam hubungan antara negara berkembang seperti Indonesia atau “ketimun” dengan negara-negara industri maju atau “durian”.

Tetapi apakah kebijakan orientasi ke dalam berarti memisahkan diri sama sekali dari pasar internasional? Jawabnya ialah tidak.

Tetapi hubungan itu perlu produktif. Ini artinya hubungan ekonomi, sosial-kultural dan politik dengan luar negeri perlulah menunjang peningkatan produktivitas masyarakat Indonesia. Ini berarti perlunya dikembangkan strategi alokasi sumber-sumber ekonomi yang berorientasi ke dalam sehingga lembaga-lembaga pembangunan Indonesia menjadi efektif sebagaimana sudah disampaikan di atas.

Perlu ditekankan hubungan-hubungan yang merugikan dengan luar negeri pada ujungnya terletak pada kelemahan kelembagaan sendiri. Ini berlawanan dengan anggapan teori ketergantungan yang menganggap bahwa masalah-masalah negara berkembang utamanya disebabkan oleh hubungan yang tidak adil dengan negara-negara maju. Kalau lembaga-lembaga dalam negeri cukup kuat dan efektif maka hubungan dengan luar negeri akan bisa lebih menguntungkan. Umpamanya, kalau korupsi dalam negeri sudah bisa diatasi, keamanan dalam negeri terjamin, maka posisi moral tinggi (“*moral high ground*”) yang dimiliki Indonesia dan negara-negara berkembang umumnya terhadap negara maju akan dapat dimanfaatkan lebih efektif untuk menghapus hutang, meminta negara-negara kuat untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri, baik secara terang-terangan maupun

sembunyi-sembunyi, mengadakan tawar-menawar yang lebih efektif, dan lain-lain.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan dapatlah disampaikan bahwa Sritua Arief telah memberi kontribusi yang besar bagi bangsa dengan tulisan-tulisannya yang melawan arus. Lebih dari itu ia mengingatkan pentingnya memelihara dan menjaga nilai harga diri, kemandirian, dan kemerdekaan dalam hubungan dengan pasar luar negeri dan lembaga internasional. Pendekatan struktural termasuk teori ketergantungan telah sejak lama mengemukakan hubungan yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang. Hubungan itu begitu tidak seimbang sehingga diposisikan keterbelakangan negara berkembang adalah disebabkan hubungan yang tidak seimbang ini. Terjadi penghisapan surplus ekonomi negara berkembang oleh negara maju.

Bagaimana jalan keluar dari *impasse* ini? Menurut kaum strukturalis harus ada restrukturisasi hubungan besar-besaran antara negara maju dan berkembang, antara Utara dan Selatan.

Dalam tulisan ini dikemukakan bahwa syarat mutlak bagi keberhasilan pembangunan negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah adanya perubahan orientasi strategi dari yang berorientasi luar ke yang berorientasi ke dalam; dari yang berbasis ideologi operasional materi ke yang berbasis ideologi operasional manusia dan kemanusiaan. Untuk menunjang pelaksanaan strategi demikian itu, maka kebijakan yang menyangkut hubungan dengan luar adalah autarki selektif. Bentuk konkrit autarki selektif memerlukan penjabaran lebih lanjut.

DAFTAR BACAAN

- Arief, S., 2001, *Indonesia Tanah Air Beta*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo: Muhammadiyah University Press, 335 halaman
- _____, 2002, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo: Muhammadiyah University Press.
- _____, 1995, *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*, Jakarta: LP3ES,
- Majalah *The Economist*, 3-9 July, 2004.
- Maizels, A., *New Evidence on the North-South Term of Trade*, Website
- Hasibuan, S., 2004: *Meraih Keunggulan Indonesia, Strategi Alternatif Pembangunan Bangsa*, Fakultas Ekonomi, Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta.
- Bank Indonesia, 2004, Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, *Perkembangan Pasar Keuangan Indonesia*, Semester II 2003, Jakarta.